



Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka

Katriela Mura^{1*}, Maria Sisilia Lou Kelen²

^{1,2}Politeknik Negeri Kupang

*E-mail korespondensi: murasesa03@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Lembaga Investasi Danantara sebagai entitas pengelola kekayaan negara dalam bentuk investasi strategis telah menimbulkan diskursus penting terkait dampaknya terhadap kestabilan negara, baik dari aspek hukum maupun ekonomi. Di satu sisi, lembaga ini diposisikan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memperluas basis investasi nasional; di sisi lain, potensi konsentrasi kekuasaan ekonomi dan lemahnya pengawasan publik menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif dampak hukum dan ekonomi dari Lembaga Investasi Danantara terhadap stabilitas negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, kajian akademik, dan analisis kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ekonomi, Danantara memiliki potensi besar dalam mempercepat pembangunan nasional melalui mobilisasi aset strategis dan peningkatan investasi jangka panjang. Namun secara yuridis, keberadaannya menuntut penataan regulasi yang jelas, sistem pengawasan independen, serta jaminan akuntabilitas publik untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan risiko moral hazard. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi pengelolaan investasi dan perlindungan terhadap prinsip negara hukum demi menjamin kestabilan nasional yang berkelanjutan.

Kata kunci: Lembaga Investasi Danantara; stabilitas negara; hukum; ekonomi; studi pustaka

Abstract

The establishment of Danantara Investment Agency as a state-owned investment management entity has sparked significant discourse regarding its impact on national stability, both from legal and economic perspectives. On one hand, this agency is positioned to strengthen fiscal independence and expand the national investment base; on the other, the potential concentration of economic power and weak public oversight raise concerns about adherence to principles of transparency and accountability in governance. This article aims to descriptively analyze the legal and economic implications of the Danantara Investment Agency on national stability. Utilizing a qualitative method with a literature review approach, the study examines official documents, relevant legislation, academic literature, and policy analyses. The findings indicate that economically, Danantara holds considerable potential in accelerating national development through the mobilization of strategic assets and the enhancement of long-term investment. However, from a legal standpoint, its existence demands clear regulatory frameworks, independent oversight mechanisms, and guarantees of public accountability to prevent overlapping authority and moral hazard risks. This study concludes that a balance must be maintained between efficient investment management and the protection of the rule of law to ensure long-term national stability.

Keywords: Danantara Investment Agency; national stability; legal; economic; literature review



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Stabilitas negara merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi dan kompetisi ekonomi yang semakin ketat, negara-negara berkembang seperti Indonesia dituntut untuk mengelola kekayaan dan aset strategisnya secara lebih produktif dan berorientasi jangka panjang (Zulhidayat et al., 2024). Salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang diandalkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah pembentukan Lembaga Investasi Danantara. Lembaga ini dirancang sebagai entitas pengelola kekayaan negara dalam bentuk investasi yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai aset negara, dan memperkuat daya saing nasional (Ni'matul Maula et al., 2025).

Namun, di balik narasi optimisme tersebut, kehadiran Danantara menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis. Pertama, secara yuridis, belum terdapat kerangka hukum yang secara komprehensif mengatur fungsi, kewenangan, dan mekanisme pengawasan terhadap lembaga ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat dimanfaatkan secara oportunistik oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, dari sisi ekonomi, model lembaga investasi seperti Danantara meniru struktur *sovereign wealth fund* (SWF) yang lazim digunakan di negara-negara dengan cadangan devisa besar dan sistem tata kelola yang mapan. Implementasi model ini di Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti lemahnya akuntabilitas fiskal, birokrasi yang kompleks, dan rendahnya literasi publik terhadap investasi negara. Ketiga, belum adanya kajian akademik yang mendalam mengenai implikasi langsung lembaga ini terhadap stabilitas negara, baik dalam pengertian stabilitas ekonomi makro maupun stabilitas kelembagaan dan tata hukum nasional, membuka ruang bagi spekulasi dan bias dalam persepsi publik (Ayu, C. D. et al., 2025).

Dalam kajian sebelumnya, sebagian besar literatur menyoroti fungsi dan potensi lembaga sejenis dari aspek ekonomi semata, dengan pendekatan teknokratis yang cenderung mengabaikan sisi hukum dan implikasi konstitusionalnya. Beberapa studi bahkan hanya membahas perbandingan SWF di tingkat global tanpa menelaah kecocokan model tersebut dalam konteks politik-hukum Indonesia. *Research gap* inilah yang coba diisi oleh penelitian ini: yaitu dengan menghadirkan analisis integratif yang menelaah secara simultan aspek hukum dan ekonomi dari keberadaan Lembaga Investasi Danantara terhadap kestabilan

negara (Solihin et al., 2025).

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif yuridis (konstitusionalitas, pengawasan, tata kelola) dan perspektif ekonomis (efisiensi investasi, dampak fiskal, stabilitas makro), serta pada fokus kajiannya terhadap satu lembaga yang baru dan relatif belum banyak diteliti secara akademis, yaitu Danantara. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi pustaka, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap diskursus mengenai arah kebijakan investasi negara dan peran lembaga investasi dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis secara mendalam implikasi keberadaan Lembaga Investasi Danantara terhadap stabilitas negara dari sudut pandang hukum dan ekonomi. Data yang digunakan bersumber dari berbagai literatur sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen resmi yang relevan (Adlini et al., 2022).

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Proses ini melibatkan identifikasi dan interpretasi terhadap tema-tema pokok seperti legalitas, tata kelola, efektivitas ekonomi, serta risiko sistemik yang ditimbulkan oleh lembaga tersebut. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual dan memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana kebijakan publik yang berbasis hukum dan ekonomi (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Legitimasi Lembaga Investasi Danantara

Lembaga Investasi Danantara merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan instrumen pengelolaan investasi negara yang lebih modern dan terstruktur, dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan optimalisasi aset negara.

Secara umum, Danantara dirancang menyerupai model sovereign wealth fund (SWF) yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti Temasek Holdings di Singapura atau Government Pension Fund Global di Norwegia. Namun, permasalahan utama yang muncul adalah belum adanya undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur pembentukan, fungsi, dan pengawasan terhadap Danantara. Ketiadaan regulasi primer (primary legislation) tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas dan legitimasi yuridis lembaga ini dalam sistem hukum nasional (Ni'matul Maula et al., 2025).

Dari perspektif konstitusional, pembentukan lembaga negara atau lembaga yang menggunakan kewenangan negara seharusnya tunduk pada asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pembentukan suatu lembaga publik yang mengelola kekayaan negara dan berperan dalam kebijakan fiskal strategis seharusnya memiliki dasar hukum dalam bentuk undang-undang, bukan sekadar Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Tanpa dasar hukum yang memadai, terdapat risiko *ultra vires* atau bertindak melampaui kewenangan, yang dapat merugikan negara dan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (Kurniawati & Liany, 2019).

Lebih lanjut, dalam teori hukum administrasi negara, setiap lembaga publik wajib tunduk pada prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, efisiensi, dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, keberadaan Danantara masih menyisakan kerancuan dari sisi status hukumnya: apakah ia termasuk BUMN, lembaga non-struktural, atau entitas hibrida yang memiliki status semi-publik dan semi-swasta. Ambiguitas ini berdampak langsung pada mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, serta posisi lembaga ini dalam struktur kelembagaan negara (Sulistyowati et al., 2024).

Ketidakjelasan status hukum ini juga berdampak pada hak publik atas informasi dan pengawasan oleh lembaga negara seperti DPR dan BPK. Jika Danantara mengelola aset strategis negara, maka seharusnya terbuka ruang pengawasan oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Namun jika statusnya semi-swasta, maka ada potensi lolos dari pengawasan publik. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan demokrasi, karena penggunaan kekayaan negara tidak diiringi dengan mekanisme checks and balances yang memadai. Dalam konteks ini,

legitimasi bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik (public trust) dan akuntabilitas demokratis (Susanto, 2018).

Sementara itu, dari perspektif komparatif hukum, berbagai negara yang memiliki sovereign wealth fund umumnya memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara rinci struktur, mandat, dan pengawasan lembaga tersebut. Misalnya, Norway's Government Pension Fund Global diatur melalui Government Pension Fund Act yang membatasi ruang gerak investasi dan mempertegas akuntabilitasnya kepada parlemen. Demikian pula, Temasek Holdings tunduk pada Companies Act Singapura dan tunduk pada laporan publik tahunan secara transparan. Indonesia, jika ingin meniru model-model tersebut, perlu terlebih dahulu membangun arsitektur hukum yang kuat dan adaptif, yang sesuai dengan konteks sosial-politik dan sistem tata kelola nasional (Ayu, C. D. et al., 2025).

Dengan demikian, dasar hukum dan legitimasi Lembaga Investasi Danantara saat ini masih berada dalam zona abu-abu normatif. Ketiadaan *lex specialis*, ambiguitas status kelembagaan, serta lemahnya keterbukaan informasi berpotensi menurunkan efektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas lembaga ini di mata publik. Untuk menghindari implikasi hukum dan politik yang merugikan ke depan, sangat penting bagi pemerintah dan DPR untuk segera membentuk kerangka regulasi primer yang menjadi payung hukum bagi Danantara, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang berintegritas dan demokratis.

Tata Kelola dan Transparansi Kelembagaan Lembaga Investasi Danantara

Tata kelola kelembagaan (governance) merupakan pilar utama dalam menjamin integritas dan efektivitas lembaga publik, terlebih lagi pada entitas yang mengelola aset negara dalam skala besar seperti Lembaga Investasi Danantara. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan supremasi hukum, menjadi landasan normatif yang harus ditegakkan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa struktur tata kelola Danantara masih menyimpan sejumlah permasalahan, terutama terkait kejelasan posisi hukum, mekanisme pengawasan, dan keterbukaan informasi publik (Chotimah, 2019).

Secara struktural, Danantara dirancang sebagai entitas yang fleksibel dan profesional, tetapi dalam praktiknya justru menciptakan hibridisasi status kelembagaan yang berpotensi

melemahkan kontrol publik. Jika lembaga ini bukan BUMN tetapi memiliki karakteristik entitas komersial negara, maka pertanggungjawabannya berada dalam ruang abu-abu antara entitas publik dan privat. Ambiguitas ini berdampak pada kesulitan menetapkan standar tata kelola, termasuk sejauh mana lembaga ini harus tunduk pada UU BUMN, UU Keuangan Negara, atau bahkan peraturan pasar modal jika melibatkan investasi dari luar negeri. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi, ketidakjelasan ini melemahkan kepastian hukum dan menyulitkan pembentukan sistem pengawasan yang efektif (Solihin et al., 2025).

Masalah yang paling mencolok dalam tata kelola Danantara adalah minimnya transparansi informasi kelembagaan, terutama dalam aspek penyusunan kebijakan investasi, pemilihan proyek strategis, serta rekam jejak pengelolaan aset. Hingga saat ini, tidak tersedia secara terbuka dokumen strategis seperti Rencana Investasi Jangka Panjang, laporan keuangan tahunan, atau audit independen yang bisa diakses publik. Padahal, prinsip transparansi publik merupakan fondasi akuntabilitas dalam negara demokratis dan dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketertutupan ini menimbulkan persepsi bahwa pengelolaan Danantara berlangsung secara tertutup, elitis, dan berpotensi menyuburkan praktik moral hazard (Ni'matul Maula et al., 2025).

Dari sisi mekanisme pengawasan, tidak ada kejelasan struktur pengawasan multi-level yang seharusnya menjadi mekanisme pengaman kelembagaan. Idealnya, lembaga yang mengelola aset publik harus tunduk pada pengawasan internal (audit, manajemen risiko), eksternal (BPK, DPR), dan sosial (masyarakat sipil dan media). Namun, desain kelembagaan Danantara belum menunjukkan integrasi pengawasan tersebut secara utuh. Ketika lembaga ini diberi keleluasaan berinvestasi lintas sektor dan lintas wilayah tanpa sistem kontrol yang memadai, maka risiko korupsi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan sumber daya negara menjadi sangat tinggi (Ni'matul Maula et al., 2025).

Jika dibandingkan secara internasional, lembaga seperti Temasek Holdings dan GIC di Singapura menerapkan prinsip tata kelola modern berbasis meritokrasi dan transparansi publik yang ketat. Mereka secara rutin merilis laporan kinerja, melakukan audit independen, dan tunduk pada pengawasan parlemen serta otoritas publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sovereign wealth fund sangat ditentukan oleh desain kelembagaan yang jelas,

profesional, dan terbuka (Muhammad Jamaludin, 2023).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata kelola dan transparansi Danantara masih jauh dari ideal dan membutuhkan reformasi kelembagaan yang serius. Pemerintah perlu merumuskan kerangka regulasi tata kelola yang eksplisit, membentuk mekanisme pengawasan independen, serta mendorong keterbukaan informasi yang sistematis agar lembaga ini benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional, bukan alat ekonomi-politik segelintir elite. Tanpa tata kelola yang kuat dan transparansi yang terjamin, Lembaga Investasi Danantara berisiko menjadi instrumen oligarkis yang justru memperlemah stabilitas negara yang hendak ia perkuat.

Peran Strategis dan Risiko Ekonomi Lembaga Investasi Danantara

Lembaga Investasi Danantara dibentuk dengan tujuan untuk mengelola aset negara secara lebih produktif dan berkelanjutan, dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global. Namun, dalam implementasinya, meskipun Danantara memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, lembaga ini juga menghadapi sejumlah risiko ekonomi yang perlu dianalisis secara mendalam. Peran strategis Danantara dalam perekonomian Indonesia, serta potensi risiko yang ditimbulkan, sangat bergantung pada pengelolaan yang hati-hati dan pengawasan yang efektif (Ayu, C. D. et al., 2025).

Secara teori, sovereign wealth fund (SWF) seperti Danantara diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen investasi yang membawa manfaat jangka panjang bagi negara. Dalam konteks Indonesia, Lembaga Investasi Danantara memiliki potensi untuk meningkatkan cadangan devisa negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta mengalokasikan dana untuk proyek infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan industri manufaktur, Danantara diharapkan dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer (seperti migas dan pertanian). Dalam teori ekonomi pembangunan, keberadaan SWF dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengelola surplus negara dan meratakan distribusi ekonomi di dalam negeri (Christyanti, 2025).

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa risiko ekonomi yang mengintai di balik potensi besar tersebut. Pertama, risiko fiskal terkait dengan pengelolaan dana negara yang besar. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada kemungkinan bahwa Danantara akan menghadapi risiko moral hazard, di mana pengelola lembaga ini membuat keputusan investasi yang tidak menguntungkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Salah satu contoh nyata adalah praktik yang terjadi di negara-negara dengan SWF yang tidak memiliki pengawasan yang baik, yang mengarah pada kerugian finansial besar atau kebijakan investasi yang kurang prudent. Jika Danantara gagal mengelola risiko-risiko tersebut dengan baik, maka negara dapat mengalami kerugian yang berdampak pada kestabilan fiskal dan keuangan negara (Christyanti, 2025).

Kedua, terdapat risiko sistemik yang berkaitan dengan dampak global terhadap kinerja investasi Danantara. Investasi yang dilakukan oleh lembaga ini sangat bergantung pada kondisi pasar global, termasuk fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan moneter internasional, serta ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi arus modal. Misalnya, investasi yang terkonsentrasi pada sektor energi atau infrastruktur di luar negeri dapat terpengaruh oleh penurunan permintaan global atau perubahan regulasi di negara tujuan investasi. Ketergantungan pada pasar global yang volatile dapat menyebabkan kerugian yang besar jika tidak diimbangi dengan strategi investasi yang terdiversifikasi dan pengelolaan risiko yang matang (Defilania & Silalahi, 2025).

Selain itu, risiko likuiditas juga perlu diperhatikan. Lembaga seperti Danantara yang mengelola aset dalam jumlah besar sering kali terlibat dalam investasi jangka panjang yang mungkin tidak segera memberikan hasil yang optimal. Jika pasar mengalami ketidakpastian, Danantara bisa terjebak dalam situasi di mana nilai aset yang dimilikinya turun drastis dan likuiditas menjadi terbatas, yang bisa mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus memperhatikan risiko penurunan nilai pasar dan kesulitan dalam menjual aset di saat yang kurang menguntungkan (Defilania & Silalahi, 2025).

Di samping itu, ketergantungan pada sumber daya domestik juga menjadi faktor risiko yang signifikan. Terlalu banyak berfokus pada investasi dalam negeri bisa menyebabkan Danantara mengalami kesulitan jika terjadi ketegangan politik, krisis ekonomi, atau perubahan besar dalam kebijakan domestik yang merugikan sektor-sektor strategis yang

menjadi target investasi. Dalam hal ini, penting bagi Danantara untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi, baik secara geografis maupun sektoral, guna mengurangi ketergantungan pada kondisi ekonomi domestik yang mungkin tidak selalu stabil (Christyanti, 2025).

Dari perspektif perbandingan internasional, banyak negara yang telah berhasil mengelola sovereign wealth fund mereka dengan sangat hati-hati, menggunakan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang ketat. Misalnya, Temasek di Singapura memiliki kebijakan investasi yang konservatif, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang dan pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah Singapura juga memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan oleh profesional yang memiliki rekam jejak yang jelas dan terbuka terhadap publik. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia, bahwa keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuan strategis ekonomi akan sangat bergantung pada profesionalisme pengelolaan, transparansi informasi, dan pengawasan yang ketat oleh lembaga yang berwenang (Defilania & Silalahi, 2025).

Oleh karena itu, meskipun Lembaga Investasi Danantara memiliki peran strategis yang besar dalam pembangunan ekonomi nasional, namun lembaga ini juga menghadapi sejumlah risiko ekonomi yang perlu dikelola dengan hati-hati. Untuk memastikan bahwa Danantara dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung stabilitas ekonomi negara, diperlukan sistem pengelolaan investasi yang prudent, diversifikasi yang memadai, serta pengawasan yang kuat baik dari lembaga internal maupun eksternal. Tanpa langkah-langkah mitigasi risiko yang jelas, Lembaga Investasi Danantara berisiko menjadi beban fiskal dan ekonomi bagi negara, bukannya alat untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

Implikasi terhadap Stabilitas Negara dan Rekomendasi Kebijakan

Lembaga Investasi Danantara memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas negara, baik dalam konteks ekonomi maupun politik. Sebagai lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah besar, Danantara berpotensi memperkuat perekonomian Indonesia melalui pengelolaan investasi yang produktif. Namun, tanpa adanya mekanisme pengelolaan yang baik, lembaga ini juga dapat menimbulkan risiko politik dan krisis kepercayaan publik

yang dapat melemahkan stabilitas nasional. Implikasi keberadaan Danantara terhadap stabilitas negara ini harus dianalisis dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi ekonomi makro, tata kelola pemerintahan, dan hubungan antara lembaga negara (Ni'matul Maula et al., 2025).

Secara ekonomi, peran Lembaga Investasi Danantara sebagai penyokong perekonomian jangka panjang sangat bergantung pada kualitas pengelolaan aset dan keputusan investasi yang diambil. Salah satu tujuan utama lembaga ini adalah untuk meningkatkan cadangan devisa, mengurangi defisit anggaran negara, serta berkontribusi pada pendapatan negara melalui investasi yang menguntungkan. Jika Danantara berhasil mencapai tujuan tersebut, maka negara akan memperoleh manfaat jangka panjang yang signifikan, seperti penguatan stabilitas fiskal dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Namun, jika terjadi kegagalan dalam pengelolaan, misalnya karena keputusan investasi yang buruk atau penyalahgunaan wewenang, maka negara dapat menghadapi kerugian finansial besar yang mengganggu kestabilan ekonomi makro (Solihin et al., 2025).

Dampak risiko politik yang timbul dari pengelolaan Danantara juga tidak bisa diabaikan. Mengingat bahwa lembaga ini beroperasi dengan menggunakan sumber daya negara, ada kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan investasi. Dalam konteks demokrasi, apabila keputusan-keputusan investasi Danantara tidak transparan atau terkesan berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, maka hal ini dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Krisis kepercayaan ini berpotensi memperburuk stabilitas politik negara, karena masyarakat merasa bahwa sumber daya negara dikelola secara tidak adil atau tidak efektif (Ayu, C. D. et al., 2025). Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, Danantara harus memastikan bahwa seluruh keputusan investasi dilandasi oleh kepentingan publik dan dilaksanakan dengan integritas.

Secara lebih luas, keberadaan Danantara juga memiliki implikasi terhadap hubungan internasional Indonesia. Sebagai lembaga investasi negara, Danantara berinteraksi dengan pasar global dan berbagai lembaga internasional, seperti lembaga multilateral (IMF, World Bank) dan lembaga investasi global. Keputusan investasi yang diambil oleh Danantara dapat mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, baik dalam hal kredibilitas ekonomi maupun komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Dengan kata lain, pengelolaan

yang baik akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, sementara pengelolaan yang buruk dapat merusak reputasi negara dan menurunkan kepercayaan investor asing (Solihin et al., 2025).

Rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari Danantara, antara lain:

1. Penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif. Pemerintah perlu segera menetapkan undang-undang khusus yang mengatur keberadaan dan operasional Lembaga Investasi Danantara, mencakup berbagai aspek seperti struktur kelembagaan, mekanisme investasi, dan sistem pengawasan. Regulasi yang jelas akan memperkuat legitimasi hukum Danantara dan memberikan kepastian bagi para investor dan masyarakat.
2. Penguatan pengawasan internal dan eksternal. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang, Danantara harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang transparan dan independen. Pengawasan eksternal oleh lembaga seperti BPK dan DPR perlu diperkuat, sementara pengawasan internal melalui audit dan manajemen risiko harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan investasi tetap berada dalam jalur yang benar dan tidak merugikan kepentingan negara.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Danantara perlu menerapkan prinsip transparansi yang ketat dalam pengelolaan informasi dan kebijakan investasi. Publik dan masyarakat internasional harus memiliki akses terhadap laporan kinerja tahunan, laporan keuangan, serta hasil audit yang dilakukan oleh lembaga independen. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi lembaga tersebut di mata masyarakat dan investor global.
4. Diversifikasi investasi dan mitigasi risiko. Dalam rangka mengurangi risiko sistemik, Danantara harus memastikan bahwa portofolio investasinya terdiversifikasi dengan baik, baik secara sektoral maupun geografis. Dengan cara ini, lembaga ini dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari fluktuasi pasar global atau ketidakpastian ekonomi domestik. Selain itu, Danantara harus memiliki strategi mitigasi risiko yang matang untuk menghadapi potensi kerugian finansial dan krisis likuiditas.
5. Fokus pada keberlanjutan ekonomi. Danantara perlu berfokus pada investasi yang tidak

hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi pada sektor-sektor energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan teknologi inovatif akan mendukung tujuan jangka panjang Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketahanan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, meskipun Lembaga Investasi Danantara memiliki potensi untuk berperan strategis dalam memperkuat ekonomi negara, namun keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan terukur. Jika tidak dikelola dengan baik, lembaga ini dapat menimbulkan risiko fiskal, politikal, dan sosial yang dapat mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan yang tepat harus diambil untuk memastikan bahwa Danantara berfungsi dengan maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis mengenai dampak keputusan investasi Lembaga Investasi Danantara terhadap stabilitas sektor-sektor strategis di Indonesia, seperti energi, infrastruktur, dan teknologi. Fokus penelitian bisa diarahkan pada pengukuran dampak ekonomi jangka panjang dari investasi yang dilakukan oleh Danantara, serta bagaimana kebijakan pengelolaan dana ini dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan risiko perubahan iklim. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran Danantara dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh politik terhadap keputusan ekonomi negara, dengan menggunakan pendekatan analisis jaringan untuk memahami keterkaitan antara aktor-aktor politik dan ekonomi dalam pengelolaan lembaga ini. Penelitian lebih lanjut dapat menggunakan pendekatan studi komparatif internasional untuk menggali praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Danantara, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen.

KESIMPULAN

Lembaga Investasi Danantara, sebagai instrumen pengelolaan aset negara, memiliki peran strategis dalam memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui pengelolaan investasi yang berkelanjutan dan peningkatan cadangan devisa. Namun, keberhasilan lembaga

ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, dan kebijakan investasi yang prudent. Meskipun Danantara memiliki potensi untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang, pengelolaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti minimnya transparansi kelembagaan, risiko fiskal, dan ketidakpastian pasar global. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak positifnya, diperlukan reformasi dalam regulasi kelembagaan Danantara, peningkatan transparansi dalam pengelolaan informasi publik, serta penguatan mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan dan strategi pengelolaan Danantara difokuskan pada keberlanjutan ekonomi dan manajemen risiko yang lebih matang, guna memastikan bahwa lembaga ini dapat berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ayu, C. D., Febiani, F., Ardhani, F., Leonardo, M., Syahwa, N., & Nuraya, A. S. (2025). Keterkaitan Danantara dengan Stabilitas Keuangan Makro di Indonesia: Sebuah Pendekatan Teori Ekonomi Makro. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(2), 1026–1031.
- Chotimah, H. C. (2019). Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara [Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(2), 113–128. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1447>
- Christyanti, B. L. (2025). PERUBAHAN REZIM HUKUM DAN RISIKO IMPUNITAS KORUPSI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA. *Jurnal Suara Keadilan*, 26(1), 121–136.
- Defilania, O., & Silalahi, W. (2025). Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 7125–7134.
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Muhammad Jamaludin. (2023). Indonesia Investment Authority sebagai SWF Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial*,

- Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 283–301. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.364>
- Ni'matul Maula, P., Danie, E. V., Irawan, M. H. A., & Lumban Gaol, S. R. (2025). PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN INVESTASI KEUANGAN NEGARA. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(2), 129–143. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10832>
- Solihin, D., Antoni Ludfi Arifin, & Joko Nugroho. (2025). DANANTARA: PILAR EKONOMI ATAU BEBAN NEGARA? *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 12(1), 225–235.
- Sulistyowati, Maharani, D. N., Maharaja, G. B. M., & Carnely Kahe, A. M. (2024). Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 8(1). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>
- Susanto, M. (2018). Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi. *INTEGRITAS*, 4(2), 29. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.294>
- Zulhidayat, M., Reyza, S. H., & Ahmad Dahlan Al Haris. (2024). Dinamika Kepemimpinan Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Negara. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN)*, 1(3), 191–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i3.1123>